

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024

KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program :								
<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p>	<p><input type="checkbox"/> Unsur Masyarakat yang Terlibat: Masyarakat (RT/ RW/ Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda)</p> <p><input type="checkbox"/> Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien.</p> <p><input type="checkbox"/> Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kelurahan Tahun 2023 adalah 35% dan Laki-laki 65%</p> <p><input type="checkbox"/> Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 adalah 31,7% dan Laki-laki 68,3%</p>	<p><input type="checkbox"/> Aspek Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kandung dan KAN diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki</p> <p><input type="checkbox"/> Aspek Kontrol/ Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat RW dan tingkat Kelurahan.</p> <p><input type="checkbox"/> Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.</p> <p><input type="checkbox"/> Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam</p>	<p>1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat;</p> <p>2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.</p>	<p>1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan;</p> <p>2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll;</p> <p>3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas;</p> <p>4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.</p>	<p>Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender</p>	<p>a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan</p> <p>b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender</p>	<p>input : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat RW, Murenbang Tk Kelurahan dan Kecamatan)</p> <p>output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan</p>	<p>input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat RW, Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.</p> <p>output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan</p>

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program :								
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender		bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan.					outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Kelurahan dan Kecamatan

Payakumbuh, Maret 2023

CAMAT PAYAKUMBUH BARAT



U. FAKHRI, S. Sos

NIP. 19810924 200901 1 004